

**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin****Volume 1, Nomor 6, Juli 2023****E-ISSN: 2986-6340****DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8147194>**

## **Penerapan E-Government Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin (Studi Pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kependudukan)**

*Implementation Of E-Government in Citizen Services and Resident Registration in Banyuasin Province (Research on Application Population Management Information System)*

**Dian Novita Fajar Sari<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu

Administrasi Satya Negara Palembang, Sumatera Selatan

Email: [diannovita@gmail.com](mailto:diannovita@gmail.com)<sup>1</sup>

### **Abstrak**

Menerapkan E-Government pada era modern saat ini harus mementingkan teknologi informasi sehingga dalam pelayanan publik secara online dapat lebih efektif dan efisien. Untuk menerapkan E-Government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu memerhatikan tentang bagaimana elemen-elemen untuk menerapkan E-Government. Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan E-Government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian Deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan 3 elemen dalam menerapkan E-Government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin, yaitu: 1). Elemen Support adanya dukungan dan keinginan dari pimpinan Instansi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin dalam menerapkan E-Government dan dengan adanya aturan yang mendukung dalam menerapkan E-Government. 2). Elemen Capacity yang meliputi dengan tersedianya sumber daya finansial yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, tersedianya sumber daya infrastruktur yang mendukung dalam menerapkan E-Government seperti computer, wifi, print dan yang lain, dan tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kapasitas yang mempunyai untuk melaksanakan E-Government atau pelayanan kepada masyarakat secara online. Dan yang ke 3). Adalah Elemen value yang merupakan manfaat yang dirasakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin sebagai yang memberikan pelayanan online kepada masyarakat yang dalam menerapkan E-Government memberikan dampak manfaat yang besar dari segi inovasi pelayanan yang efektif dan efisien pada saat sekarang ini di instansi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin, sedangkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sebagai yang menerima pelayanan yaitu adanya kemudahan dalam mendapatkan pelayanan karna tidak perlu lagi datang ke kantor untuk mendapatkan pelayanan terlebih yang jauh dari kantor.

**Kata Kunci:** *Elemen Penerapan, E-Government, Banyuasin*

### **Abstract**

*Today's modern implementation of e-government requires prioritization of information technology so that online public services become more effective and efficient. In order to implement e-government in Banyuasin Provincial Population and Registry Office and provide services to municipalities, it is necessary to pay attention to what are the factors for implementing e-government. The purpose of this study is to determine the implementation of e-Government in the Banyuasin Province Population and Civil Registration Office. Use of descriptive research type qualitative research methods. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. Data analysis process Includes data reduction, data presentation, and inference. The results of this study demonstrate his three factors in the implementation of e-government in population and registration services in Banyuasin province. 1). The supporting element is the support and desire of the Banyuasin Regency Population and Registry leadership in implementation. E-government and rules that support e-government implementations. 2). Capacity factors include the availability of financial resources from local revenue and expenditure budgets, the availability of infrastructure resources to support e-government implementations such as computers, WiFi, and printing, and the availability of personnel with capacity includes possibilities. E-Conduct government or community services online and the third). It is a value factor that the*

*Banyuasin Regency Population and Civil Registry Service recognizes as providing online services to the community, and in the implementation of e-government, this is now a big plus in terms of effective and efficient service innovation. Influencing. The population has a service agency and a civil registration office in Banyuasin province, but the benefit felt by the community as recipients of the service is that they no longer need to come to the office to receive the service, especially if they are far away it is easy to get service from the office.*

**Keyword:** *Implementation elements, e-government, Banyuasin*

## PENDAHULUAN

*Electronic* management atau manajemen elektronik adalah suatu bentuk Implementasi yang menggunakan teknologi informasi untuk menyediakannyapelayanan pemerintah kepada masyarakat. *E-government* adalah bisnisPengembangan manajemen elektronik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Paradigma pelayanan negaraditandai dengan birokrasi yang lambat, prosedur yang saling terkait danKetidakpastian dalam upaya mengatasinya melalui pengenalan *e-government*. Dalam paradigma *electronic government*, pemberian pelayanan kepada masyarakat tidak demikiansekali lagi diselesaikan dengan dokumentasi dan interaksi tatap muka, tetapi melaluisecara elektronik sehingga tidak ada interaksi tatap muka saat memberi melayani Efisiensi biaya produksi diinvestasikan dalam penyediaan layanan Pindah ke tren yang menekankan fleksibilitas, kontrol, dan Kepuasan pengguna (Ridwan & Nurhakim, 2014).

Perkembangan teknologi informasi yang sering disebut dengan *e-government* sebagai bagian dari globalisasi tidak dapat dipisahkan dari masyarakat modern karena masyarakat modern lebih terbuka terhadap kebutuhan Negara sebagai penyedia layanan memenuhi tanggung jawabnya berkomunikasi secara lebih efektif dan efisien kepada pemerintah dan menyediakan akses informasi nyaman, terutama informasi dari pemerintah (Angguna & Gani, 2015).

Electronic government di Indonesia diluncurkan pada tahun 2001 olehInstruksi Presiden No. 6 tentang telekomunikasi, media dan teknologi informasi,yang mengharuskan pejabat pemerintah harus menggunakan teknologi tersebutInformasi untuk mendukung tata kelola yang baik dan mempercepat prosesDemokrasi. Selain itu, tentang manajemen elektronik pada tahun 2003 Presidenmengeluarkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan *E-Government* Nasional. Jaksa Agung, GubernurJenderal dan Walikota Pemerintah Indonesia dan Republik Indonesia mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnyaotoritas untuk mengembangkan *e-government* nasional (Yulinar Ayu Setiani, Dr. Maesaroh, 2016).

Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tentang Otonomi Daerah Tahun 2014 mendorong setiap daerah untuk bekerja keras memperbaiki citranya,kualitas manajemen dan tentu saja kualitas layanan hadirin Penerapan manajemen elektronik dalam administrasi Hal itu diyakini dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Melakukan *website/website* pemda merupakan langkah awal Pengembangan konsep administrasi elektronik. Jadi pemiliknya Kelompok kepentingan/pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi lebih cepat dan lebih cepat mengelola pelayanan publik dengan baik (Adibowo & Putri, 2016).

Lahirnya Undang-Undang No. 23 tentang Otonomi Daerah Tahun 2014 mendorong setiap daerah untuk bekerja keras memperbaiki citranya, kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan tentunya kualitas pelayanan publik. Penerapan manajemen elektronik dalam administrasiHal itu diyakini dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Melakukan *website/website* pemda merupakan langkah awal Pengembangan konsep administrasi elektronik. Jadi pemiliknya Kelompok kepentingan/pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi lebih cepat dan lebih cepatmemberikan pelayanan publik (Nugraha, 2018).

Penerapan akuntabilitas dan transparansi didorong *Good governance* yaitu penggunaan sistem informasi untuk menemukan tempat yang harmonis dalam organisasi

otoritas. Akuntabilitas dan transparansi ini merupakan persyaratan dasar bagi organisasi industri publik harus mendapatkan kepercayaan public. Mengkoordinasikan implementasi dan proses kerja melalui optimalisasi Keterkaitan antara inisiatif masing-masing lembaga dan penguatan kerangka kerja untuk memastikan bahwa mereka terintegrasi ke dalam jaringan sistem operasi. Metode ini diperlukan untuk mengkoordinasikan keduanya terkait Kepentingan tersebut dapat diwujudkan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Ini dapat diimplementasikan dengan memperkenalkan manajemen elektronik. pemerintah kapan dimanapun dan kapanpun. Manajemen elektronik juga dimungkinkan pelayanan publik yang lebih cepat (Mariano, 2019).

Salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang jasa publik yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin bertanggung jawab untuk memberikan layanan yang berkaitan dengan pengelolaan kartu identitas Penduduk (KTP) atau akte kelahiran untuk kotamadya dan aplikasi terus berkembang setiap tahunnya. Masyarakat selalu meminta itu dari birokrat meskipun harus memberikan pelayanan publik yang baik seringkali tidak memenuhi harapan akibat pelayanan publik kenyataannya masih rumit, lamban, mahal dan membosankan. Alasan untuk tren ini adalah bahwa perusahaan masih diposisikan sebagai pihak yang melayani pesta disajikan.

Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan perbaikan pelayanan publik dengan menyediakan fasilitas pelayanan dalam pengertian ini yang sebenarnya. Pelayanan yang harus ditujukan kepada masyarakat kadang jadi pegawai negeri walaupun sudah bernegara itu untuk kebaikan masyarakat satu-pemerintah mengelola daftar penduduk yang diinginkannya menjadi tanggung jawab kabupaten/kota dalam proses pelaksanaannya, Kota/Kelurahan adalah kepala daftar penduduk sampai hari itu Warga negara terdaftar secara administratif sebagai warga negara Indonesia sampai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kependudukan.

Berbagai kelemahan diidentifikasi selama implementasi (sistem informasi manajemen kependudukan) sebagai sistem yang dimaksudkan Pengelolaan data sistem kependudukan saat ini di instansi, seperti kelurahan, kelurahan, dan kantor pendaftaran penduduk. Dimana lagi Banyak penipuan identitas terjadi karena kurangnya informasi rinci data demografis. Seperti yang ditemukan di Kabupaten Banyuasin, Temukan beberapa identitas dengan nomor identifikasi yang berbeda.

Masih banyak celah dalam pelayanan hadirin Masih banyak orang yang tidak puas dan mengeluh Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin. Banyak Warga yang mengeluhkan layanan ini, salah satunya layanan KTP elektronik, karena petugas tidak tepat waktu di loket. Masalah selanjutnya adalah Pencetakan KTP tertunda karena koneksi jaringan yang buruk.

Implementasi administrasi elektronik dalam pelaksanaannya Transparansi dan akuntabilitas sistem manajemen modern Hasil penelitian: Kemajuan komunikasi dan informasi melalui internet memperluas peluang untuk hubungan antara politik, demokrasi dan masyarakat. *E-government* adalah pintu masuk untuk membuat proses politik lebih inklusif dan demokratis. Pemerintah kota dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan, Pelaksanaan dan pengendalian kebijakan publik. Perkembangan teknologi Internet telah meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kecepatan layanan lebih murah, bisa menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat dan mampu bekerja lebih cepat (Ridwan & Nurhakim, 2014).

Penerapan administrasi elektronik di instansi berwenang juga dapat digunakan cara yang tepat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena Perlu faktor-faktor yang mendukung keberhasilannya Karena permasalahan tersebut, peneliti mengambil inisiatif penelitian yang berjudul “Implementasi *e-government* pada otoritas publik Dinas Kependudukan dan Pendaftaran Kabupaten Banyuasin (Penelitian pada Aplikasi Sistem

Informasi Manajemen Kependudukan). Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian ini Pemberlakuan administrasi elektronik di instansi otoritas dibahas bersama Pemerintah. Itu membuat perbedaan dalam penelitian kami lebih fokus pada penerapan administrasi elektronik di Kementerian Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Enrekang.

Elemen implementasi e-government yang sukses Penanganan kemiskinan di dinas sosial Pekan Baru Hasil penelitian: Studi ini berkontribusi pada literatur di manamenunjukkan unsur-unsur sukses yang diperlukan dalam implementasimanajemen elektronik dalam administrasi yang menawarkan orang lainManfaat baik kualitas maupun efisiensi pelayanan publik Efisiensi layanan dan kemampuan pemecahan masalahSalah satunya adalah kemiskinan. Dalam implementasi manajemen elektronikitu membutuhkan elemen yang, disederhanakan, terdiri dari tigaunsur yaitu dukungan, kemampuan dan nilai (Cantika & Rfs, 2021).

Persamaan penelitian yang dibuat oleh Diva Cantika berkaitan dengan serta penerapan administrasi elektronik di otoritas publikStudi ini berkaitan dengan penerapan *e-government* Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin. Namun, ada satu perbedaan kecil dalam penelitian ini, yaituRiset Diva Cantika lebih fokus pada implementasi yang berhasil *E-governance* dalam memerangi kemiskinan, tetapi dalam penelitianfokus ini lebih kepada implementasi *e-governance* di wilayah Banyuasin.

Administrasi elektronik dan pelayanan publik (Studi pada Komponen keberhasilan pengembangan *e-government* di pemerintah kabupatenSchlemann).Hasil penelitian: Persetujuan penyelenggaraan administrasi elektronik.Pemahaman informan terhadap konsep *e-government* cukup baik. Mereka percaya bahwa penerapan *e-government* untuk pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien. Tantangan NegaraKabupaten Sleman sebagai pihak yang berinisiatifPenerapan administrasi elektronik masih perlu meyakinkan mereka yang *e-government*. Pemahaman informan tentang konsep pemerintahan elektronik sudah cukup bagus (Joko Tri Nugraha, 2018). Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Joko Tri Nugraha Pembahasan implementasi *e-governance* dan penelitian iniyang mengatur tentang penyelenggaraan administrasi elektronik.Namun tentu saja ada perbedaan pada persamaan di atas, apa bedanya, penelitian kami lebih berorientasi pada aplikasi administrasi elektronik di dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Banyuasin.

## KAJIAN TEORITIS

### Konsep e-government

*E-government* adalah media yang mendefinisikantentang media menurut Marshall McLuhan dalam bukunya *Understanding Media*, menyatakan bahwa media adalah perpanjangan tangan manusiaorang) (Noveriyanto et al., 2018).

Istilah *e-government* memiliki banyak definisi, dan menurut Bank Dunia, e-Pemerintah mengacu pada penggunaan teknologi komunikasi dalam otoritas public negara atau otoritas publik. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan Libatkan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pelaksanaannyapemerintah sehingga dapat merespon secara lebih efektif dan efisienEfisien. Oleh karena itu, hasil diperoleh melalui manajemen elektronik Ciptakan *good governance*, kurangi korupsi, perbaikiKeterbukaan, kenyamanan lebih, pendapatan pemerintah meningkatdan/atau penghematan biaya (Hardjaloka, 2014).

Manajemen elektronik juga merupakan bentuk manajemen Penggunaan teknologi baru untuk akses publikTingkatkan informasi dan layanan pemerintah dengan nyaman Kualitas layanan dan menawarkan lebih banyak pilihandalam berpartisipasi dalam proses dan institusi demokrasi (Irawan, 2013).

Definisi *e-government* telah dikemukakan oleh beberapa sumber. BeberapaPara ahli memiliki definisi yang berbeda-beda, namun mengacu pada makna yang sama, yaitu

Organisasi pemerintahan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk melakukan tugas administrasi dan pemeliharaan mereka Pelayanan publik. Penggunaan dalam konteks ini mencakup penggunaan Perangkat-perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*) dan jaringan komputer memfasilitasi komunikasi dan mengontrol proses bisnis melalui manajemen elektronik, Informasi dan layanan pemerintah dapat disediakan secara online Internet dan media digital lainnya. Properti internet dan media digital memungkinkan warga untuk menggunakan layanan e-government setiap saat dimanapun dan kapanpun. Manajemen elektronik juga memungkinkan interaksi dan Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat untuk bertukar informasi (Purwaningsih, 2017).

### **Manfaat e-governance**

Penggunaan teknologi internet dalam bidang administrasi disebut perdagangan elektronik. Pemerintah. Sederhananya, *e-government* adalah kegiatan yang Pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan dukungan teknologi informasi. Sesuai dengan semangat reformasi berperan dalam peningkatan kualitas karena birokrasi Indonesia pelayanan publik dan bantuan informasi masyarakat secara lebih efektif. Seiring waktu *e-goverment* telah berubah. Di negara maju, di lingkungan pemerintahan berhasil efektifitas prosedur administrasi birokrasi terhadap munculnya inovasi di lapangan pelayanan publik (Sudarsono & Lestari, 2018).

Manfaat teoritis yang diharapkan dari pengenalan manajemen elektronik yaitu (Irawan, 2013):

1. *E-Government* meningkatkan efisiensi, teknologi informasi dan Komunikasi meningkatkan pemrosesan banyak tugas dan kegiatan administrasi publik. Aplikasi web bias Kumpulkan dan kirimkan data penyimpanan, berikan menginformasikan dan berkomunikasi dengan pelanggan melalui lebih Berbagi informasi dengan dan antar pemerintah akan meningkatkan efisiensi di masa mendatang dapat dicapai secara signifikan.
2. *E-Government* akan meningkatkan layanan jika pemerintah menginginkannya Perhatikan pengguna, ini berarti pengguna tidak harus mengertistruktur manajemen yang kompleks dan hubungan interaktif dengan pemerintah. Internet dapat membuat pekerjaan pemerintah lebih mudah Organisasi yang berkumpul dan menawarkan layanan online untuk membantu untuk mencapai tujuan ini. Layanan resmi elektronik harus diatur sedemikian rupa Kebutuhan dan nilai pengguna sebagai bagian dari strategi layanan banyak saluran
3. *E-government* dapat membantu mencapai hasil kebijakan tertentu. Internet dapat membantu pemangku kepentingan berbagi informasi dan ide, mempromosikan hasil politik tertentu. Misalnya data Online, penggunaan tutorial atau bisa meluas Pelatihan tambahan dapat meningkatkan pertukaran informasi di sektor kesehatan Penggunaan sumber daya dan perawatan pasien serta berbagi informasi antara negara bagian dan kota dapat mempromosikan kebijakan untuk lingkungan
4. Manajemen elektronik dapat mendorong tercapainya tujuan kebijakan ekonomi; e-Pemerintah dapat membantu mengurangi, meningkatkan korupsi Transparansi dan kepercayaan pada pemerintah dan bantuan mencapai tujuan ekonomi. Termasuk efek khusus Kurangi pengeluaran publik melalui rencana yang lebih efisien Penyederhanaan administrasi Peningkatan teknologi dan informasi informasi dan komunikasi Negara meningkatkan produktivitas perusahaan.
5. *E-government* dapat menjadi pendorong penting reformasi dan teknologi Informasi dan komunikasi mendukung reformasi di banyak bidang, misal melalui peningkatan keterbukaan, berbagi informasi dan inkoherensi intern
6. *E-government* dapat meningkatkan kepercayaan antara pemerintah dan warga negara; Membangun kepercayaan antara pemerintah dan warga negara merupakan dasar pemerintahan yang baik teknologi informasi dan Komunikasi membantu membangun kepercayaan melalui iklan Partisipasi warga negara dalam proses politik, promosi terbuka

dan akuntabel manajemen dan membantu mencegah Korupsi. Selanjutnya, jika keterbatasan dan tantangan dapat diatasi, *e-government* dapat membantu memastikan bahwa suara individu didengar dalam debat lebih luas

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif, adalah cara atau strategi untuk memperoleh informasi dan fakta kemudian diolah untuk keperluan penelitian. metode penelitian yang digunakan pada hakekatnya adalah cara ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang ditujukan dan untuk penggunaan tertentu. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan secara rinci Subyek penelitian dan dalam hal ini menganalisis fenomena social adalah penerapan administrasi elektronik di bagian kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin, penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan, meringkas keadaan yang berbeda, situasi yang berbeda atau fenomena realitas yang berbeda yang ada dalam masyarakat.

Sumber data yang digunakan adalah berupa data Sekunder dan data Primer dimana Data Sekunder adalah Data yang diperoleh dengan cara mengambil data dari buku, jurnal serta aturan-aturan yang berkaitan dengan judul penelitian sedangkan Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau instansi yang terkait dalam penelitian. Informan penelitian disini adalah narasumber atau orang yang diminta keterangan berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Informan penelitian ini dipilih dari orang-orang yang mengetahui pokok permasalahan penelitian. Dimana informan ini diharapkan memberikan data secara obyektif, netral dan dapat dipertanggungjawabkan.. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengenalan administrasi elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin Penerapan manajemen elektronik untuk penyediaan layanan Komunisme adalah hak yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Pelayanan publik dapat ditingkatkan dengan memperkenalkan administrasi elektronik cepat, layanan tepat waktu dan layanan yang sama untuk semua Masyarakat dan implementasi *e-government* akan berkurang biaya operasional pemerintah sehingga pelayanan yang diberikan lebih efisien dan efektif sekarang di era pandemi Covid-19.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin dalam mewujudkan penerapan *e-government* untuk memudahkan masyarakat dalam menerima pelayanan sehingga orang harus datang jauh-jauh ke kantor dalam mengurus data kependudukan secara *online*. Ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui untuk membuatnya bekerja memperkenalkan administrasi elektronik di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Banyuasin telah berjalan sebagaimana mestinya Unsur-unsur pelaksanaan *e-government* harus memperhatikan kebutuhan masyarakat. Adapun 3 elemen dalam penerapan *e-government* diantaranya:

### 1. *Support*/Dukungan

Elemen support merupakan elemen yang paling penting dalam hal ini penerapan *E-Government*, sebab perlu dukungan dari instansi pemerintah agar konsep *E-Government* dapat diterapkan. Tanpa adanya keinginan dari instansi pemerintahan maka penerapan *E-Government* sangat sulit untuk diterapkan misalnya:

- a. Disepakatinya kerangka *e-government* sebagai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga harus diberikan prioritas tinggi

- sebagaimana kunci-kunci sukses lain diperlakukan. Dengan disepakatinya kerangka tersebut secara bersama, maka tingkat resistensi dimungkinkan akan kecil.
- b. Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, financial, tenaga, waktu, informasi, dan lain-lain) di setiap tataran pemerintahan untuk membangun konsep ini dengan semangat lintas sectoral Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktural pendukung agar terciptanya lingkungan kondusif untuk mengembangkan *e-government* (seperti adanya Undang-Undang yang jelas, ditugaskannya lembaga-lembaga khusus, misalnya Detiknas di Indonesia sebagai penanggung jawab utama, disusunnya aturan main kerja sama dengan swasta dan lain sebagainya).
  - c. Adanya aturan yang mendukung penerapan *E-Government* di instansi pemerintahan. Berjalan sistem kerja dalam suatu pemerintahan memerlukan aturan yang sangat mendukung penerapan sistem kerja tersebut dalam hali ini penerapan *E-Government*. Oleh sebab itu penerapan *E-government* di suatu instansi pemerintah memerlukan aturan yang menaungi penerapan itu, sehingga sistem kerja tersebut bias berjalan baik dengan aturan aturan yang berlaku

Dukungan yang dimaksud adalah dukungan atau keinginan Pemerintah dalam penyelenggaraan administrasi elektronik. harusnegara adalah keinginan atau dukungan lain antara pejabat publik dan politik untuk menerapkan *e-government*, tanpa dukungan pemerintah, berbagai inisiatif akan sulit memasuki implementasi *e-government*, sebagai penunjang atau aturan untuk mendukung penerapan *e-government* yaitu surat Surat Edaran Pelaksanaan PERMENDAGRI No. 104 Tahun 2019 tentang dokumentasi Administrasi Kependudukan pasal 19 ayat 6 yang isinya adalah dokumen publik dalam bentuk digital dan ditandatangani secara elektronik dan KTP tidak memerlukan legalisir

Hal yang paling penting adalah dukungan dari bagian-bagian negara. Administrator kemauan politik untuk menerapkan administrasi elektronik harus ada, karena ini berlaku untuk seluruh proses *e-government*. Itu berarti Manajer tidak hanya harus terampil dalam merumuskan konsep, tetapi juga Pada tahap implementasi, motivasi harus diperdalam lagi pelaksanaan berjalan dengan lancar.

## 2. *Capacity* (sumber daya)

Elemen kapasitas merupakan bagian dari kapabilitas atau sumber daya Implementasi manajemen elektronik, implementasi manajemen elektronik di tempat Pemerintah sangat membutuhkan sumber daya yang cukup Implementasi inovasi ini, serta sumber daya keuangan, sumber daya infrastruktur dan personel. Bagaimana jika tiga sumber dayaKetika persyaratan ini terpenuhi, itu adalah kunci untuk mewujudkan impian *e-government* anda pemerintah terwujud. tiga masalah sumber daya dalam pelaksanaannyaManajemen elektronik meliputi:

- a. Manajemen sumber daya manusiaSalah satu faktor yang mempengaruhi implementasi penyelenggaraan administrasi elektronik, yaitu sumber daya manusia yang dimiliki sesuai dengan bidang kegiatannya Pelayanan di kantor kependudukan dan pencatatan sipil. Karena Proses implementasi membutuhkan dukungan semua orang para pihak dan dalam hal personel, sumber daya keuangan danSumber daya infrastruktur untuk implementasi *e-government*.
- b. Sumber keuangan kecuali sumber daya manusia yang terkait dengan implementasi Juga administrasi elektronik, sumber daya keuangan sangat dibutuhkan danmenentukan pemenuhan sarana lainnyaImplementasi layanan *online* untuk menyediakan layananuntuk masyarakat.

- c. Sumber Daya Infrastruktur dimana ketersediaan infrastruktur ini sangat menentukan Sukses dalam implementasi *e-government* dimana sumber daya ini sangat penting di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin.

### 3. *Value* (manfaat)

Merupakan aspek yang ditinjau dari sisi tuntutan masyarakat (*demand side*) manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dalam menerima pelayanan dengan adanya pelayanan secara online ini begitu bermanfaat kepada masyarakat karna masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh ke kantor mealkukan pelayanan data kependudukan cukup melalui *website* dan *watshapp* Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin. Manfaat yang dirasakan pemerintah dalama hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin dengan adanya pelayanan secara online sangatlah efektif dan efisien dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dan ini juga dapat mencegah penularan covid-19 pada saat ini, berbagai inisiatif dalam penerapan *E-government* tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut. Yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *E-government* bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat yang sebagai menerima pelayanan dan mereka yang berkepentingan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang berjudul Penerapan Administrasi e-Government pada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten banyuasin (penelitian tentang aplikasi sistem informasi manajemen kependudukan). Dalam penyelenggaraan administrasi elektronik di pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Banyuasin, ada tiga unsur dalam *E-Government* ditanya: 1) *Elemen Support*, Kesimpulannya adalah indikator pendukung elemen digunakan administrasi elektronik di daerah enrekanng lebih tepatnya di dinas Penduduk dan daftar penduduk sesuai dengan hasil wawancara tidak optimal karena beberapa item tidak termasuk dalam elemen suppr diimplementasikan dengan benar untuk memperlambat layanan Pengenalan *e-governance* di semua kantor kabupaten Banyuasin.

Hasilnya: Di tengah krisis corona, penerapan administrasi elektronik semakin meningkat pelan-pelan, padahal mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 104 Tahun 2019 tentang pendokumentasian administrasi kependudukan merupakan peraturan wajib yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan Dapatkan KTP dengan menerapkan administrasi elektronik. 2) *Elemen Capacity*, Mengenai elemen kapasitas, disimpulkan bahwa penerapan konsep tersebut Itu cukup bagus untuk anggaran, dan aturannya sudah ada ya dilakukan untuk menerapkan *e-governance* dengan cara ini Memudahkan pelayanan publik dan catatan kependudukan dalam pelarian tugas berikutnya adalah ketersediaan sumber daya infrastruktur teknologi seperti biasa pencetakan komputer dan wifi sangat berguna dan Memaksimalkan kinerja pegawai dinas dalam penyampaian jasa kepada masyarakat agar semua orang bisa mendapatkannya pelayanan cepat 3) *Elemen Value*, Dari sini dapat disimpulkan bahwa elemen nilai adalah keuntungan yang diperoleh dari Kependuduk dan Pecatatan Sipil Kabupaten Banyuasin melaksanakan penyelenggaraan administrasi atau pelayanan elektronik Secara online bagi masyarakat, program ini berdampak besar sangat bagus untuk layanan yang efisien dan efektif. Adapun manfaatnyadikenal oleh masyarakat yaitu Pendampingan Masyarakat memberikan pelayanan dan tidak lagi harus datang ke kantor untuk menerima layanan

**Referensi**

- Adibowo, R., & Putri, S. O. (2016). *Penerapan E-Government Dalam Paradiplomasi Pemerintah Kota Bandung*. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, Vol.3, No.1. . <https://doi.org/10.26785/jipk.v3i1.2367>
- Anggana, Y. P., & Gani, A. Y. A. (2015). *Upaya Pengembangan E-Government Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Koperasi Dan Ukm Kota Malang*. *Administrasi Publik*, 3(1), 80–88.
- Cantika, D., & Rfs, H. T. (2021). *Elemen Sukses Pelaksanaan E-Government dalam Penanggulangan Kemiskinan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol.9, No.1
- Hardjaloka, L. (2014). *Studi Penerapan E-Government Di Indonesia Dan Negara Lainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi Di Sektor Publik*. *Jurnal Rechts Vinding*, 3
- Irawan, B. (2013). *Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik*. *Jurnal Paradigma*, 2(1)
- Mariano, S. (2019). *Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik Di Kabupaten Sidoarjo*. *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 2, No.1 <https://doi.org/10.15321/jkp.v11i1.1821>
- Nugraha, J. T. (2018). *E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman)*. *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, Vol.2, No.1, 32–42. <https://doi.org/21.12811/kkm.v2211.4232>
- Noveriyanto, B., Nisa, L. C., Bahtiar, A. S., Sahri, S., & Irwansyah, I. (2018). *E-Government Sebagai Layanan Komunikasi Pemerintah Kota Surabaya (Studi Kematangan e-government Sebagai Layanan Komunikasi Government to Government, Government to Citizen, Government to Business)*. *Profetik: Jurnal Komunikasi*, Vol.11, No.1, 37. <https://doi.org/10.14421/pjk.v11i1.1371>
- Purwaningsih, E. H. (2017). *E-Government Dan Aplikasinya Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kualitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau)*. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 21(2)
- Ridwan, M., & Nurhakim, S. (2014). *Implementasi E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern*. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(3).
- Sudarsono, B. G., & Lestari, S. P. (2018). *Kajian Literatur Model Konseptual Keberhasilan E-Government*. *Jurnal KOMIK*, Vol.2, No.1 491–498
- Yulinar Ayu Setiani, Dra. Maesaroh, M. S. D. (2016). *Analisis pengembangan e-government di kabupaten kendal*. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 1, No 9. <https://doi.org/10.15526/jap.v11i9.1391>